



## **Model Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Konsekuensi Ekonominya bagi Masyarakat Pringsewu: Sebuah Analisis Etika Bisnis Islam**

Siti Rohaya <sup>1</sup>

<sup>1</sup> UIN Jurai Siwo Lampung, Lampung

\* CORRESPONDENCE: ✉ [rohayasiti98@gmail.com](mailto:rohayasiti98@gmail.com)

---

### **Abstract**

*The development of the tourism sector plays a significant role in enhancing community economic welfare while contributing to regional and national income. In Pringsewu Regency, tourism potential is utilized to support regional development and to shape the distinct identity of the area. As a sector that directly interacts with local communities, tourism generates various social and economic impacts on the surrounding population. This study aims to analyze the strategies used in developing the tourism industry and to examine its impacts on the community's economy from the perspective of Islamic business ethics. This research employs a qualitative approach with a field research design, descriptive in nature, and collects data through interviews and documentation. The data were analyzed inductively to obtain a comprehensive understanding of the phenomenon. The findings indicate that the tourism development strategies implemented by the Pringsewu Regency Government include conducting tourism awareness training and outreach programs, promoting tourism through social and electronic media, organizing various events, and improving supporting facilities and infrastructure. The economic impacts of tourism on the community are reflected in increased income levels, the creation of employment and entrepreneurial opportunities, and the growing involvement of women in economic activities. From the perspective of Islamic business ethics, these strategies and their implementation align with the principles of trustworthy resource management, responsible utilization of natural assets, and environmental preservation, all of which represent ethical values emphasized in Islam.*

---

### **Article Info**

#### **Article History**

Received : 10-12 2025,

Revised : 12-12-2025,

Accepted : 15-12-2025

#### **Keywords:**

Tourism Development;

Local Economy;

Community Welfare;

Islamic Business Ethics

---

## **PENDAHULUAN**

Pengembangan wilayah merupakan kebutuhan fundamental bagi setiap daerah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Bungin, 2013). Di antara berbagai sektor yang menopang pembangunan, pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah (Pitana & Diarta, 2009). Pariwisata tidak hanya menyediakan ruang rekreasi, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dari berbagai lapisan, termasuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan devisa negara (Suwanto, 2004). Fenomena ini juga terjadi di Kabupaten Pringsewu, yang kini mulai mengembangkan potensi pariwisata secara lebih terarah (Arfianti, 2019). Keberadaan objek wisata membawa dampak ekonomi, sosial, dan budaya karena kegiatan pariwisata berhubungan langsung dengan masyarakat lokal (Josephine et al., 2015). Melalui industri pariwisata, berbagai kegiatan komersial seperti perhotelan, kuliner, jasa perjalanan, dan industri kreatif tumbuh secara

simultan dan memberikan multiplier effect (Liga Suryadana & Octavia, 2015). Dengan meningkatnya aktivitas wisata, masyarakat memperoleh kesempatan kerja lebih luas, peluang wirausaha, dan peningkatan taraf hidup, sehingga sektor ini diyakini mampu menjadi pilar perekonomian daerah yang berkelanjutan (Akhmad et al., 2016).

Sejalan dengan pentingnya kontribusi sektor ini, Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu daerah di Provinsi Lampung yang memiliki potensi pariwisata sangat beragam, baik berupa wisata alam, budaya, religi, kuliner maupun wisata buatan (Rahmalia, 2019). Obyek wisata yang tersebar di berbagai kecamatan, seperti Talang Indah, Bukit Pangonan, Telaga Gupit, Puncak Bukit Selapan, hingga Bendungan Way Sekampung, menegaskan kekayaan sumber daya alam yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik utama wisatawan (Dadan, 2014). Selain itu, keberadaan rumah adat, tempat ibadah bersejarah, kawasan kuliner lokal, dan agrowisata menambah keragaman khas daerah yang bernilai ekonomi tinggi jika dikelola secara optimal (Trianggono et al., 2018). Namun, potensi besar tersebut juga menghadirkan tantangan seperti ketimpangan, degradasi lingkungan, dominasi investor, dan keterbatasan kapasitas masyarakat lokal dalam memanfaatkan peluang ekonomi (Lukmanul Hakim, 2010). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata yang pesat harus dibarengi pendekatan pengelolaan yang terarah, partisipatif, dan beretika agar manfaatnya dirasakan secara merata oleh masyarakat (Bambang & Roedjinandari, 2017).

Untuk memahami dinamika tersebut, literatur akademik memberikan landasan teoretis mengenai bagaimana pariwisata berfungsi sebagai industri kompleks yang mampu menggerakkan perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan penguatan sektor-sektor terkait (Muljadi, 2009). Matthieson dan Wall (1982) menjelaskan bahwa pariwisata adalah perpindahan sementara seseorang ke luar wilayah tinggalnya untuk rekreasi dan pemenuhan kebutuhan tertentu melalui fasilitas wisata. Dalam perspektif Islam, aktivitas wisata setara dengan safar yang mendorong manusia merenungi ciptaan Allah, mengambil pelajaran, serta meningkatkan ketakwaan melalui pengamatan terhadap fenomena alam dan sosial (Ibrahim Lubis, 1995). Al-Qur'an, khususnya Q.S. Ar-Rum ayat 41, menegaskan pentingnya menjaga kelestarian alam serta menghindari kerusakan akibat ulah manusia (Departemen Agama RI, 2005). Prinsip etika bisnis Islam seperti amanah, keadilan, tanggung jawab, dan pelestarian lingkungan menjadi pedoman penting dalam mengelola pariwisata secara berkelanjutan (Badroen & Mufrani, 2006; Beekum, 2004). Dengan demikian, pengembangan pariwisata idealnya tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etis dan ekologis (Ernawati, 2011).

Berdasarkan fenomena sosial dan kajian literatur tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Pringsewu serta menelaah dampaknya terhadap perekonomian masyarakat dalam perspektif etika bisnis Islam. Untuk itu, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan utama: (1) Apa strategi pengembangan pariwisata yang diterapkan pemerintah Kabupaten Pringsewu? (2) Bagaimana dampak ekonomi pariwisata terhadap masyarakat lokal? (3) Sejauh mana strategi dan implementasi pengembangan pariwisata tersebut sejalan dengan prinsip etika bisnis Islam? Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai pola pengembangan pariwisata di Pringsewu serta memetakan peran pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan sektor pariwisata berbasis nilai Islam.

Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan pariwisata daerah (Bambang & Roedjinandari, 2017). Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai model pariwisata berbasis etika bisnis Islam, khususnya di wilayah berkembang yang memiliki karakter sosial budaya unik seperti Kabupaten Pringsewu (Faisal Badroen & Mufrani, 2006). Penelitian ini menawarkan perspektif yang tidak hanya menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keberhasilan, tetapi juga menekankan pentingnya keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab moral sebagaimana diajarkan dalam Islam (Irham, 2013). Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengembangan pariwisata yang lebih inklusif, berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, dan pelestarian lingkungan (Husein Umar, 2006). Selain itu, temuan penelitian memberikan pedoman bagi pengelola wisata agar menjalankan praktik bisnis yang transparan, etis, dan berkelanjutan (Hasan, 2009). Dengan demikian, penelitian ini berupaya menciptakan ekosistem pariwisata yang mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi masyarakat Kabupaten Pringsewu (Yusrisa Febriana, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data empiris mengenai strategi pengembangan pariwisata dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat (Bungin, 2013). Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi nyata di lapangan, sehingga peneliti dapat menangkap makna, pola, dan pengalaman subjek yang tidak dapat dijelaskan melalui data numerik (Fathoni, 2006; Hadi, 1981). Proses penelitian dimulai dari identifikasi lokasi, pemilihan informan secara purposif, hingga penyusunan pedoman wawancara sebagai alat utama pengumpulan data (Arikunto, 2006). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti pejabat Dinas Pariwisata, pengelola objek wisata, dan masyarakat lokal yang terlibat dalam aktivitas pariwisata (Koentjaraningrat, 2001). Sementara itu, data sekunder dihimpun melalui dokumentasi berupa arsip pemerintah, laporan kegiatan, foto, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan (Kuncoro, 2003). Seluruh data dikumpulkan secara sistematis dan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis induktif, yaitu dengan menelaah data per bagian, mengelompokkan temuan lapangan ke dalam kategori tertentu, mengidentifikasi hubungan antar kategori, hingga menghasilkan kesimpulan umum yang menjawab rumusan masalah penelitian (Bungin, 2013). Prosedur ini memungkinkan penelitian direplikasi karena setiap tahapan, mulai dari pengumpulan data, penggunaan instrumen, teknik analisis, hingga proses verifikasi dijelaskan secara operasional (Fathoni, 2006). Dengan desain deskriptif kualitatif ini, penelitian berupaya menggambarkan dan memaparkan kondisi faktual masyarakat serta strategi pengembangan pariwisata sebagaimana terjadi di lapangan (Pitana & Diarta, 2009; Suwantoro, 2004).

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Strategi dan Konsep Pengembangan Pariwisata**

Strategi merupakan rencana jangka panjang yang disusun untuk mencapai tujuan organisasi melalui serangkaian keputusan mendasar dan alokasi sumber daya yang terarah (Husein, 2006).

Craig & Grant memandang strategi sebagai proses penetapan sasaran jangka panjang beserta arah tindakan untuk mencapainya (Rachmat, 2013), sementara Porter menegaskan bahwa strategi adalah alat penting yang memungkinkan organisasi meraih keunggulan bersaing melalui pemilihan rencana terbaik oleh pemimpin puncak (Ali Hasan, 2009). Dalam konteks pariwisata, strategi menjadi sangat penting karena sektor ini menuntut pengelolaan potensi daerah secara terarah, terukur, dan selaras dengan tujuan pembangunan ekonomi (Gamal Suwanto, 2004). Pariwisata sendiri dipahami sebagai aktivitas perjalanan sementara ke luar tempat tinggal untuk berbagai kepentingan sosial, budaya, ekonomi, kesehatan, maupun spiritual, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 yang menekankan sifat sukarela dari perjalanan wisata serta tujuan menikmati objek dan daya tarik wisata (Pitana & Diarta, 2009). UNWTO menambahkan bahwa pariwisata mencakup perjalanan dan tinggal tidak lebih dari satu tahun untuk tujuan non-pekerjaan (Muljadi, 2009), sementara Hunziker dan Krapf melihatnya sebagai keseluruhan jaringan dan gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing tanpa tujuan bekerja yang memberikan keuntungan permanen (Arjana, 2016). Pemahaman ini menunjukkan bahwa strategi dan pariwisata memiliki keterkaitan erat, khususnya dalam mengoptimalkan potensi daerah dan menciptakan pengalaman wisata yang bernilai.

Dengan dasar tersebut, strategi pengembangan pariwisata kemudian dapat dipahami sebagai upaya terencana untuk menggali, memperbaiki, dan mengoptimalkan potensi wisata suatu daerah melalui peningkatan infrastruktur fisik sekaligus penguatan aspek nonfisik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Bambang Supriadi & Roedjinandari, 2017). Ahdinoto menyebut lima komponen utama yang harus diperhatikan dalam pengembangan pariwisata, yaitu atraksi wisata sebagai daya tarik inti, promosi dan pemasaran untuk memperkenalkan potensi daerah, pasar wisata yang berkaitan dengan kebutuhan dan perilaku wisatawan, transportasi sebagai sarana mobilitas, serta masyarakat lokal sebagai penyedia akomodasi dan layanan pendukung (Liga Suryadana & Octavia, 2015). Inskeep & Gunn menegaskan bahwa pengembangan kawasan wisata yang berhasil bergantung pada kemampuan menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjamin kepuasan pengunjung, serta memperkuat keterpaduan pembangunan kawasan dan zona sekitarnya (Dadan Mukhsin, 2014). Oleh karena itu, strategi pengembangan pariwisata tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas atau promosi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan integrasi pembangunan secara menyeluruh agar manfaat ekonomi jangka panjang dapat diwujudkan bersamaan dengan pengalaman wisata yang berkualitas (Trianggono et al., 2018).

### **Jenis Pariwisata, Dampak Ekonomi, dan Relevansinya dengan Etika Bisnis Islam**

Pariwisata memiliki ragam jenis yang sangat luas dan mencerminkan kekayaan potensi suatu daerah, mulai dari wisata budaya dengan atraksi khas daerah, wisata kesehatan seperti mandi air panas atau terapi tradisional, wisata olahraga yang menarik pengunjung melalui berbagai event regional hingga internasional, wisata spiritual yang berkaitan dengan aktivitas ibadah, wisata alam yang menawarkan keindahan lingkungan, wisata industri yang fokus pada edukasi proses produksi, wisata cagar alam yang mengangkat kawasan lindung, hingga wisata kuliner yang memberikan pengalaman gastronomi khas suatu wilayah (Pitana & Diarta, 2009; Suwanto, 2004). Keragaman jenis wisata ini memungkinkan daerah mengembangkan potensi sesuai karakter lokal sekaligus

memperluas daya tarik bagi wisatawan dengan motivasi yang beragam. Selain menawarkan keberagaman pengalaman, sektor pariwisata juga membawa dampak ekonomi yang signifikan. Cohen (1984) mengidentifikasi delapan dampak utama pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, yaitu peningkatan penerimaan devisa, peningkatan pendapatan masyarakat, terciptanya kesempatan kerja, perubahan harga-harga, perubahan distribusi manfaat ekonomi, perubahan pola kepemilikan dan kontrol, kontribusi terhadap pembangunan umum, serta peningkatan pendapatan pemerintah (Trianggono et al., 2018; Febriana, 2018). Besarnya dampak ini menunjukkan bahwa pariwisata merupakan sektor strategis yang mampu menjadi motor penggerak ekonomi apabila dikelola secara optimal, terarah, dan berkelanjutan (Supriadi & Roedjinandari, 2017).

Namun, pengelolaan pariwisata tidak dapat hanya berorientasi pada profit atau pertumbuhan ekonomi semata. Diperlukan landasan moral agar pengembangan pariwisata tetap berada dalam koridor etis dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak. Etika bisnis Islam hadir sebagai prinsip moral berbasis Al-Qur'an dan Sunnah yang mengatur perilaku pelaku usaha, mencakup tidak hanya batasan halal-haram, tetapi juga aspek moralitas seperti amanah, integritas, dan tanggung jawab sosial (Badroen & Mufrani, 2006; Ibrahim Lubis, 1995). Dalam kerangka ini, Rafik Issa Beekum dan Husein Suhatah menjelaskan bahwa etika bisnis Islam menambahkan *dhawabith syariah* sebagai batasan moral dalam setiap aktivitas bisnis (Beekum, 2004; Hasan, 2009). Prinsip-prinsip utama etika bisnis Islam meliputi: Tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh aktivitas berada dalam pengawasan Allah; Keadilan, yaitu memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dan setiap individu mendapatkan haknya; Kehendak bebas, yaitu kebebasan bertindak selama tidak melanggar hak orang lain; dan Tanggung jawab, yaitu kewajiban mempertanggungjawabkan segala bentuk aktivitas bisnis baik kepada Allah maupun kepada manusia (Nasution et al., 2007; Fahmi, 2013). Dalam konteks pariwisata, penerapan etika bisnis Islam menjadi sangat penting agar pengelolaan wisata tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga menjunjung nilai etis, menjaga kelestarian alam, menghormati masyarakat lokal, dan memastikan bahwa manfaat pariwisata terdistribusi secara adil dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

### **Strategi Terintegrasi dalam Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pringsewu**

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Pringsewu menuntut adanya strategi yang terarah, terukur, dan berbasis partisipasi masyarakat agar mampu memberikan manfaat optimal bagi daerah maupun warga setempat (Pitana & Diarta, 2009). Hal ini penting karena sektor pariwisata tidak hanya mengandalkan daya tarik alam, tetapi juga memerlukan perencanaan matang agar potensi wilayah dapat dikelola secara berkelanjutan (Supriadi & Roedjinandari, 2017). Alasan utama dibutuhkan strategi yang komprehensif adalah karena pariwisata melibatkan banyak aspek, mulai dari infrastruktur, promosi, hingga pemberdayaan masyarakat (Gamal, 2004). Berdasarkan wawancara dengan Ketua Bidang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, Bapak Sigit Budiarto, pemerintah daerah menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dengan menekankan pelatihan sadar wisata, peningkatan sarana prasarana, serta fasilitasi pelaku usaha untuk menciptakan kepuasan pengunjung. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat ditempatkan sebagai pilar utama dalam pengembangan pariwisata daerah (Lukmanul Hakim, 2010).

Alasan lain mengapa pendekatan berbasis masyarakat menjadi kunci adalah karena objek wisata banyak dikelola langsung oleh warga sekitar, sementara pemerintah berperan sebagai

regulator dan fasilitator (Arjana, 2016). Pemerintah memberikan dukungan berupa penyuluhan, pelatihan, serta arahan mengenai pengelolaan lingkungan dan inovasi wahana agar objek wisata tetap menarik (Dadan Mukhsin, 2014). Bukti dari pendekatan ini tampak dalam pernyataan Bapak Sigit yang menegaskan bahwa pemerintah “memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengelola wisata secara mandiri, sementara pemerintah mendukung melalui pelatihan serta arahan kebersihan dan inovasi fasilitas wisata.” Dengan demikian, pengelolaan pariwisata di Pringsewu menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam identifikasi potensi, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi destinasi wisata (Yusrisa Ekka Febriana, 2018).

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan wisata menjadi penting karena mereka merupakan pihak yang paling memahami kondisi lapangan (Josephine Wuri et al., 2015). Selain itu, musyawarah bersama memberi kesempatan bagi warga untuk menyumbangkan ide, pengalaman, dan informasi terkait pengembangan wisata. Hal ini diperkuat dengan bentuk partisipasi nyata seperti kerja bakti, pembersihan lingkungan, persiapan fasilitas wisata, serta keterlibatan masyarakat dalam promosi melalui media sosial (Bagus Trianggono et al., 2018). Bukti partisipasi ini terlihat dari wawancara yang menerangkan bahwa warga ikut serta dalam rapat-rapat pengembangan serta bekerja sama menjaga keamanan, kebersihan, dan ketertiban destinasi wisata. Mekanisme partisipatif ini menunjukkan bahwa masyarakat menjadi unsur kunci dalam keberlanjutan pengelolaan pariwisata Kabupaten Pringsewu (Abdilah et al., 2016).

Dari sisi promosi dan inovasi, pengelola destinasi menerapkan berbagai strategi untuk menarik wisatawan dengan memanfaatkan media digital (Suryadana & Octavia, 2015). Penjelasan Bapak Ratmin menunjukkan bahwa promosi dilakukan melalui media sosial, penyelenggaraan event, serta penciptaan spot foto baru yang mengikuti tren. Ia mengatakan bahwa pelatihan Pokdarwis juga terus dilakukan, mencakup pelatihan pemandu wisata, keamanan wisata, hingga pelatihan kuliner agar ciri khas daerah tetap terjaga namun tetap inovatif (Muljadi, 2009). Strategi ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya menyoroti aspek fisik, tetapi juga kompetensi sumber daya manusia. Hasilnya, promosi digital dan peningkatan kapasitas SDM menjadi motor utama pertumbuhan kunjungan wisatawan (Setioko, 2019).

Dukungan terhadap penguatan fasilitas fisik juga menjadi alasan penting bagi keberhasilan pariwisata di Pringsewu (Supriadi & Roedjinandari, 2017). Bapak Sujarwo selaku pengelola wisata menjelaskan bahwa peningkatan sarana prasarana seperti lahan parkir, MCK, perbaikan jalan, pondok-pondok, penginapan, dan fasilitas kuliner menjadi prioritas. Ia menambahkan bahwa “keasrian lingkungan harus dijaga karena mayoritas wisata Pringsewu mengandalkan panorama alam.” Promosi gencar melalui Instagram dan Facebook juga dilakukan dengan menonjolkan keindahan alam serta keunikan masing-masing objek wisata (Suryadana & Octavia, 2015). Promosi melalui Instagram dan Facebook dilakukan dengan menonjolkan keindahan alam dan keunikan masing-masing destinasi, sehingga memperkuat citra pariwisata daerah.

Selain itu, masyarakat menegaskan pentingnya penyuluhan sebagai dasar untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan lokal dalam mengelola wisata (Pitana & Diarta, 2009). Bapak Lukman menekankan bahwa masyarakat adalah “tuan rumah” wisata sehingga mereka perlu memahami perannya melalui penyuluhan dan pelatihan. Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas demi menciptakan keamanan, kebersihan, dan ketertiban. Bukti pernyataan ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas masyarakat menjadi fondasi utama untuk

keberlanjutan destinasi wisata (Gamal, 2004). Pada akhirnya, pola kolaboratif antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat memperkuat tata kelola pariwisata lokal (Bungin, 2013).

Persepsi pengunjung menjadi bukti keberhasilan strategi pengembangan yang diterapkan. Bapak Aldi Prayoga, misalnya, mengungkapkan bahwa ia menyukai wisata Pringsewu karena suasananya sejuk, pemandangannya indah, dan akses jalannya memadai. Ia mengenal objek wisata tersebut melalui Instagram dan berharap adanya pengembangan pusat oleh-oleh. Pernyataan ini menggambarkan bahwa media sosial efektif memperluas jangkauan informasi dan memperkuat citra destinasi (Liga Suryadana & Octavia, 2015). Sementara itu, Eka Apriani menilai bahwa fasilitas yang terus ditingkatkan, seperti pondok istirahat, wahana outbound, hingga area swafoto, meningkatkan kenyamanan dan animo pengunjung (Setioko, 2019). Widya Maharani menambahkan bahwa pembaruan wahana dan spot foto mengikuti tren kekinian menjadi daya tarik utama, ditambah akses jalan yang telah diaspal dan kebersihan yang selalu terjaga. Temuan ini menunjukkan bahwa inovasi dan penyediaan fasilitas berperan signifikan dalam meningkatkan pengalaman wisatawan (Trianggono et al., 2018).

Secara keseluruhan, pengembangan pariwisata di Kabupaten Pringsewu telah menunjukkan hasil positif, baik dari sisi peningkatan fasilitas, promosi, pemberdayaan masyarakat, maupun penguatan pengelolaan lingkungan (Supriadi & Roedjinandari, 2017). Pemerintah menyediakan sarana penunjang seperti toilet umum, tempat parkir, area kuliner, tempat ibadah, serta fasilitasi bagi pelaku usaha. Berbagai event, promosi media digital, pameran, serta pelatihan sadar wisata turut memperkuat daya tarik daerah (Suryadana & Octavia, 2015). Namun demikian, aktivitas wisata juga memiliki potensi dampak negatif terhadap lingkungan, sehingga pemeliharaan kualitas alam menjadi syarat mutlak (Gamal, 2004). Berdasarkan wawancara, pengelola wisata sangat menjaga kebersihan karena keindahan alam merupakan “produk utama”. Dengan demikian, model pengembangan pariwisata Pringsewu mencerminkan prinsip keberlanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan ekologis (Pitana & Diarta, 2009).

### **Kontribusi Ekonomi Pariwisata bagi Masyarakat Kabupaten Pringsewu**

Pariwisata di Kabupaten Pringsewu telah berkembang menjadi sektor strategis yang memberikan dorongan signifikan terhadap perekonomian lokal. Peningkatan jumlah objek wisata mendorong tingginya arus kunjungan dan memicu dinamika ekonomi masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya bertujuan meningkatkan daya tarik daerah, tetapi juga memperkuat kesejahteraan masyarakat. Orientasi pembangunan yang pro-pertumbuhan manusia menimbulkan efek ekonomi baik langsung maupun tidak langsung, yang terasa dalam jangka pendek hingga panjang. Secara umum, sektor ini menjadi motor penggerak baru bagi kehidupan ekonomi lokal.

Salah satu dampak utama yang dirasakan masyarakat adalah terbukanya lapangan pekerjaan. Pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Pringsewu menegaskan bahwa pariwisata telah menciptakan banyak peluang kerja bagi warga lokal. Seperti disampaikan oleh Bapak Sigit Budiarto, bahwa sekitar separuh masyarakat di sekitar kawasan wisata terlibat sebagai pekerja atau pelaku usaha: *“Banyak warga bekerja di area wisata; dampaknya jelas terlihat dari meningkatnya ekonomi masyarakat. Mereka berdagang, bekerja sebagai karyawan, petugas kebersihan, dan lain-lain. Pada musim liburan, pendapatan pedagang bahkan meningkat signifikan.”* Pernyataan tersebut

sejalan dengan pandangan Bapak Ratmin, yang menilai bahwa sektor ini secara otomatis menekan angka pengangguran karena masyarakat dapat berdagang atau bekerja sebagai petugas kebersihan dan pegawai pengelola wisata. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata menjadi sumber pekerjaan yang stabil dan berkelanjutan.

Peluang usaha yang tercipta juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membangun kemandirian ekonomi. Ibu Ana Fitriani, seorang pedagang, mengungkapkan bahwa pengembangan wisata memberi kesempatan besar bagi warga yang belum memiliki pekerjaan: *“Banyak yang akhirnya bisa membuka warung, toko, atau tempat peristirahatan. Pengangguran jadi berkurang.”* Sementara itu, Bapak Affandi yang bekerja sebagai penjaga wisata menuturkan bahwa keberadaan wisata membantunya memperoleh pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup: *“Dengan bekerja di sini, saya tidak lagi menganggur dan bisa menikmati keindahan alam sambil bekerja.”* Kisah serupa disampaikan Bapak Musta'im yang telah lama berdagang di kawasan wisata: *“Selain menikmati pemandangan, saya bersyukur bisa mendapatkan rezeki yang mencukupi kebutuhan keluarga.”* Pengalaman-pengalaman ini menunjukkan bahwa pariwisata memberi efek langsung terhadap peningkatan pendapatan dan stabilitas ekonomi masyarakat.

Kontribusi ekonomi pariwisata juga terlihat dari meningkatnya kesejahteraan keluarga. Ibu Septi Wahyuni, seorang pedagang, menjelaskan bahwa keberadaan objek wisata mengubah kondisi ekonominya secara bertahap: *“Sejak berdagang di sini, penghasilan keluarga meningkat. Dulu hidup agak berat karena suami hanya bekerja sebagai tukang ojek, tapi sekarang pendapatan kami lebih baik.”* Ia juga menyatakan belum merasakan dampak negatif sejauh ini. Cerita-cerita seperti ini menggambarkan bahwa sektor pariwisata tidak hanya memberi keuntungan secara makro tetapi juga mengubah kehidupan masyarakat pada level mikro, terutama bagi keluarga dengan pendapatan rendah sebelum adanya kegiatan wisata.

Pada aspek pendapatan harian, para pedagang menyediakan gambaran yang lebih konkret mengenai kondisi ekonomi mereka. Bapak Rahmad, pedagang makanan, menuturkan bahwa pendapatannya berkisar antara Rp150.000–250.000 pada hari biasa dan lebih tinggi pada akhir pekan: *“Dibilang cukup ya kadang tidak cukup, tapi masih bisa disyukuri, bahkan bisa menabung sedikit-sedikit.”* Informasi ini diperkuat oleh Bapak Purnomo, pedagang minuman, yang menyatakan bahwa pendapatannya dapat meningkat tajam pada hari besar atau akhir pekan: *“Harus pintar mengelola uang. Alhamdulillah istri juga bekerja, jadi dapur tetap ngebul. Pengelola pun bekerja sama dengan masyarakat, memberikan pelatihan sadar wisata dan inovasi agar usaha tetap berkembang.”* Keterangan ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat kunjungan wisatawan.

Selain sektor perdagangan, pekerjaan pendukung lainnya juga memberi manfaat ekonomi bagi warga. Bapak Hamim, petugas kebersihan, menjelaskan bahwa penghasilannya ditentukan oleh jumlah pengunjung: *“Kalau rata-rata per bulan minimal sekitar Rp300.000 karena sistemnya persentase. Lumayan buat tambahan, bisa nabung sedikit-sedikit.”* Sistem pendapatan seperti ini memang bersifat fluktuatif, tetapi tetap memberi kontribusi ekonomi tambahan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki sumber penghasilan tetap. Hal ini mengindikasikan bahwa pariwisata menciptakan lapisan pekerjaan baru yang fleksibel namun tetap membantu menopang ekonomi keluarga.

Secara keseluruhan, pariwisata memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan melalui peningkatan pendapatan, penciptaan peluang kerja, dan bertumbuhnya usaha kecil di sekitar objek wisata. Banyaknya wisatawan yang datang mendorong pertumbuhan berbagai jenis usaha, mulai dari penjualan makanan, minuman, cinderamata, hingga jasa penginapan. Masyarakat terdorong untuk terus berinovasi dalam memaksimalkan peluang usaha yang muncul (Febriana, 2018). Peran masyarakat dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan kawasan wisata juga menjadi penentu keberlanjutan pendapatan mereka. Lebih jauh lagi, berkembangnya sektor pariwisata menghasilkan efek berganda bagi perekonomian daerah (Arjana, 2016). Pertumbuhan usaha kecil memicu aktivitas ekonomi lainnya, termasuk meningkatnya pendapatan pajak daerah (Rahmalia, 2019). Selain itu, pengembangan wisata juga mendorong peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan sadar wisata dan pemahaman tentang kelestarian lingkungan (Dadan Mukhsin, 2014). Banyak perempuan juga mulai mendapatkan kesempatan untuk bekerja atau berwirausaha, mencerminkan adanya dorongan emansipasi ekonomi di tingkat lokal (Josephine Wuri et al., 2015). Meski demikian, semua keuntungan ini memerlukan pengelolaan wisata yang teratur dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan dampak negatif (Bambang Supriadi & Roedjindari, 2017).

Melihat berbagai temuan tersebut, pariwisata terbukti menjadi sektor yang mampu memperkuat ekonomi masyarakat Kabupaten Pringsewu secara nyata. Dengan semakin banyaknya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan, tumbuhnya usaha kecil, serta meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata, sektor ini menjadi pilar penting dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kualitas hidup warga (Setioko, 2019). Selama pengelolaannya dilakukan secara bijaksana dan berorientasi pada kesejahteraan, pariwisata dapat terus menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

### **Perspektif Etika Bisnis Islam dalam Strategi Pengembangan Pariwisata dan Dampaknya bagi Perekonomian Masyarakat Kabupaten Pringsewu**

Pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Pringsewu pada dasarnya dirancang sebagai upaya untuk menggali potensi lokal, memperkuat ekonomi masyarakat, dan menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Strategi ini tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan pendapatan melalui pemanfaatan objek wisata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan spiritual masyarakat setempat. Dalam perspektif etika bisnis Islam, aktivitas ekonomi, termasuk pengembangan pariwisata harus didasari niat ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti prinsip tauhid, keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab, serta kejujuran (Badroen & Mufrani, 2006; Beekun, 2004). Orientasi ini menggarisbawahi bahwa keuntungan materi bukan satu-satunya tujuan, melainkan harus selaras dengan kemaslahatan, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

Prinsip tauhid mengajarkan bahwa manusia sebagai khalifah memiliki kebebasan dalam mengelola potensi bumi, tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan Allah SWT. Dalam konteks pengembangan wisata, pengelola diberikan ruang untuk berinovasi selama tetap menjaga lingkungan, melindungi alam dari kerusakan, dan memastikan manfaatnya kembali kepada masyarakat (Gamal Suwanto, 2004). Pengelola wisata di Pringsewu menerapkan prinsip ini dengan mendorong pemberdayaan masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan pekerjaan, pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, serta upaya mengurangi angka pengangguran (Arjana, 2016). Bentuk implementasi tersebut tampak dalam keterlibatan warga sebagai pedagang, tenaga

kebersihan, petugas pelayanan, maupun pengelola fasilitas wisata, sehingga keberadaan wisata benar-benar menjadi sarana peningkatan ekonomi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai spiritual.

Prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam juga menjadi fondasi penting dalam tata kelola pariwisata daerah. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan dalam memperoleh kesempatan ekonomi, tetapi juga sebagai kewajiban untuk menjaga hak dan kenyamanan orang lain, termasuk wisatawan dan lingkungan (Fahmi, 2013). Pengelola menerapkan keadilan ini melalui penyediaan fasilitas yang bersih, pemisahan sampah organik dan non-organik, pelayanan ramah, serta penciptaan ruang usaha bagi masyarakat tanpa diskriminasi. Masyarakat dipersilakan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi wisata, baik sebagai pedagang makanan, penyedia jasa, hingga pengelola kios, sehingga pemerataan manfaat dapat dirasakan oleh seluruh lapisan (Josephine Wuri et al., 2015). Prinsip keadilan ini menegaskan bahwa aktivitas bisnis tidak boleh merugikan pihak lain dan harus membawa maslahat bersama.

Kebebasan individu juga diakui dalam etika bisnis Islam, selama kebebasan tersebut tidak melanggar kepentingan sosial yang lebih besar (Beekun, 2004). Dalam konteks ini, pengelola wisata di Pringsewu diberi keleluasaan untuk mengembangkan inovasi wisata, merancang konsep baru, dan bekerja sama dengan pemerintah daerah selama tetap mematuhi nilai etika. Dinas Pariwisata turut memastikan bahwa inovasi tidak merusak lingkungan, tidak menimbulkan konflik sosial, dan tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Upaya pengembangan wisata bertujuan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa mengabaikan kebersihan lingkungan maupun tata kelola limbah. Dengan demikian, kebebasan yang diberikan tetap berada dalam koridor tanggung jawab moral dan sosial sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Prinsip tanggung jawab menjadi landasan terakhir yang turut menegaskan etika dalam pengelolaan pariwisata. Para pelaku usaha dan pengelola wajib mempertanggungjawabkan aktivitas bisnis mereka bukan hanya kepada pemangku kepentingan, tetapi juga kepada Allah SWT. Hal ini dilakukan melalui pengembangan fasilitas wisata yang aman, bersih, dan memberikan kenyamanan maksimal bagi pengunjung. Berdasarkan wawancara, pengunjung merasa bahwa suasana wisata di Pringsewu nyaman, asri, sejuk, dan terjangkau sehingga mereka cenderung ingin kembali berkunjung. Masyarakat pun menyatakan bahwa pengembangan wisata memberikan dampak positif terhadap pendapatan dan peluang usaha mereka. Harapan mereka adalah agar objek wisata terus dikelola dengan baik, diperbarui secara berkala, dan dikembangkan tanpa melupakan lingkungan maupun kebutuhan pengunjung. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa ketika prinsip tanggung jawab diterapkan, pengembangan pariwisata tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga menciptakan kepuasan sosial dan spiritual bagi seluruh pihak.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Pringsewu dilaksanakan melalui pelatihan dan penyuluhan sadar wisata, promosi melalui media sosial dan media elektronik, penyelenggaraan berbagai event, serta peningkatan sarana dan prasarana, yang seluruhnya dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat. Dampak pengembangan pariwisata menunjukkan peningkatan

pendapatan masyarakat, terbukanya peluang kerja dan usaha, serta munculnya ruang emansipasi ekonomi bagi perempuan. Implementasi strategi tersebut juga selaras dengan prinsip etika bisnis Islam, terutama dalam aspek pemeliharaan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab sebagai bentuk pengabdian terhadap amanah kekhalifahan. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena data lapangan hanya menggambarkan kondisi pada waktu tertentu dan belum mencakup seluruh objek wisata di Kabupaten Pringsewu, sehingga generalisasi temuan masih perlu diuji. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan lokasi, menggunakan pendekatan mixed methods untuk memperkuat temuan kuantitatif dan kualitatif, serta menambahkan analisis komparatif agar dinamika pengembangan pariwisata dan penerapan etika bisnis Islam dapat dipahami secara lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.
- Akhmad Bories Yasin Abdilah, Dkk, *Jurnal Administrasi Bisnis*, “*Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Masyarakat Lokal di Kawasan Wisata Studi Pada Masyarakat Sekitar Wendit, Kabupaten Malang*”, Malang, Universitas Brawijaya, Vol 30, No. 1, Edisi Januari 2016.
- Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari’ah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009.
- Arfianti Nur Sa’idah, “Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung)”, dalam <http://repository.radenintan.ac.id/2568/>, diakses pada tanggal 10 November 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Bagus Trianggono, dkk, *Jurnal Pariwisata Pesona*, “*Pariwisata Dalam Perspektif Actor Network Theory Studi Kasus Top Selfie Pinusan Kragilan Desa Pogalan, Jawa Tengah, Indonesia*”, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, Vol 03, No. 2, Desember 2018.
- Bambang Supriadi & Nanny Roedjinandari, *Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2017.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Dadan Mukhsin, *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, “*Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Galunggung (Studi Kasus Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya)*” Bandung, Universitas Islam Bandung), Vol, 14 No. 1, Edisi, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung, CV. Diponegoro, 2005.
- Erni R. Ernawati, *Etika Bisnis*, Bandung, Alfabeta, 2011.
- Faisal Badroen dan M Arief Mufrani, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Yogyakarta, Andi Offset, 2004.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian Research 1*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1981.
- Husein Umar, *Managemen Strategi*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta, C.V. Andi Offset, 2009.
- I Gusti Bagus Arjana, *Gografi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.

- Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, Jakarta, Kalam Mulia, 1995.
- Irham Fahmi, *Etika Bisnis Teori, Kasus, dan Solusi*, Bandung, CV Alfabeta, 2013.
- Josephine Wuri, Dkk, *Jurnal Penelitian*, " Dampak Keberadaan Kampung Wisata Terhadap Kehidupan Ekonomi Dan Sosial Masyarakat", Volume 18, No. 2, Mei 2015.
- Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 2001.
- Kuncoro, Mudrajad. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Liga Suryadana dan Vanny Octavia, *Pengantar Pemasaran Pariwisata*, Bandung, Alfabeta, 2015.
- Lisa Putri Rahmalia, "Analisis Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam <http://repository.radenintan.ac.id/1392/>, diakses pada tanggal 15 November 2019.
- Lukmanul Hakim, *jurnal Pariwisata*, "*Industri Pariwisata Dan Pembangunan Nasional*", Salatiga, STIE AMA Salatiga, Vol.3 No.5 Juli 2010.
- Muhammad Danang Setioko, *Jurnal Pariwisata Pesona*, "*Analisis Strategi Pengembangan Wisata Kota Dikota Malang*", Malang: Universitas Merdeka Malang, Vol 04, No. 1, Juni 2019.
- Muljadi A.J, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Muljadi A.J, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta, Kencana, 2007.
- Rachmat, *Manajemen Strategik*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2013.
- Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Yusrisa Ekka Febriana, *Jurnal Administrasi Bisnis*, "*Analisis Dampak Pengembangan Kepariwisata Dalam Menunjang Keberlanjutan Ekonomi Dan Sosial Budaya Lokal Masyarakat*", Malang, Universitas Brawijaya, Vo 61, No. 4, Agustus 2018.